

Presiden Jokowi resmikan LKM Nelayan di Indramayu

Kenapa tidak menugaskan bank negara untuk kemudahan kucurkan kredit, pinjaman dengan bunga rendah pada NELAYAN/PETANI dan harus membentuk LKM, Lembaga Keuangan Mikro Nelayan, ya? Lalu, dari mana modal LKM itu? Karena dinyatakan LKM dikelola LPMUKP dibawah KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, jadi sepenuhnya dari APBN?

Saya perhatikan jalan yang ditempuh RRT saat menitik-beratkan TUGAS pada pembangunan desa-desa terbelakang sejak memasuki tahun 2006, mereka gunakan Bank Pertanian Negara yg sudah ada, untuk memberi kemudahan PETANI/NELAYAN meminjam modal dengan bunga rendah, ... untuk membeli alat-produksi, bibit, pupuk dsb. Diawal mula pelaksanaan, juga terjadi penyelewengan, penyalahgunaan kucuran kredit bunga rendah dari pemerintah itu, ... tidak sedikit kucuran dana itu larinya ke jual-beli saham! Menjadi heboh saat digempur krismon 2008, sangat keras suara ahli-ekonomi dunia meneriakkan: TIBA SAATNYA gelembung sabun ekonomi TK yang gemerlapan itu meledak! Dan, ... ekonomi TK pasti bankrut, jalan sosialisme berkarakter Tiongkok GAGAL, RRT roboh dengan sendiri!

Tapi, itulah proses KESADARAN MASYARAKAT yang memang tidak mungkin dilompati. Sekalipun sudah di PERINGATKAN, juga dibuat ketentuan rambu-rambu yang harus ditaati, tapi tetap saja dilanggar untuk kejar nafsu ingin CEPAT KAYA! Itulah sifat manusia normal pada umumnya! Sifat-sifat manusia yang memang hanya bisa dirubah dalam proses panjang pengalaman hidup dan kerja sendiri. TIDAK BISA hanya dengan ketentuan, dengan perintah sekalipun diikuti dengan KEKERASAN memaksa orang NURUT saja! TIDAK BISA! Setelah mereka terbentur benjut kepalanya dengan kegagalan jual-beli saham, ... lalu harus kembali memulai bekerja keras yang nyata, bangun berdiri sesuai kemampuan kerja masing-masing.

Agar kemudahan kucuran dana tidak diselewengkan untuk keperluan lain diluar kembangkan produksi, bank tentu lebih mengerti prosedur yg dan ketentuan-ketentuan rinci pengucuran kredit. Dengan demikian juga menjamin pembayaran cicilan bisa berlangsung lancar, yang berarti juga PRODUKSI yang dikerjakan PETANI/NELAYAN itu berhasil baik! Kesejahteraan Masyarakat meningkat, RAKYAT banyak hidup makmur sesuai HARAPAN dan TUJUAN Pemerintah, ... Itulah prinsip usaha dikerjakan bersama, untung bersama dan menang bersama!

Salam,

<https://www.antaraneews.com/berita/716672/presiden-jokowi-resmikan-lkm-nelayan-di-indramayu>

Presiden Jokowi resmikan LKM Nelayan di Indramayu

Rabu, 6 Juni 2018 23:12 WIB



Presiden Joko Widodo (kanan) bersiap memukul gong disaksikan Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso (kiri) saat peluncuran pembiayaan lembaga keuangan mikro untuk nelayan di Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (6/6/2018). Presiden berharap pembiayaan Bank Mikro Nelayan itu bisa menjadi permodalan bagi nelayan untuk mengembangkan usaha. (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meresmikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Nelayan di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Rabu.

Joko Widodo berpendapat keberadaan LKM dapat bermanfaat bagi nelayan yang membutuhkan pinjaman untuk modal usaha, tetapi suku bunganya perlu diturunkan.

Presiden mengusulkan agar bunga pinjaman di lembaga itu diturunkan dari 7 persen menjadi 3 persen per tahun, kata siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Kepala Negara pada berbagai pertemuan dengan nelayan, seringkali mendapat keluhan masalah permodalan dan pembiayaan, sehingga menyambut baik kehadiran LKM Nelayan.

Pembiayaan usaha mikro nelayan ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"BLU tidak mencari keuntungan, yang penting dananya mutar di nelayan," kata Presiden, menyebut alasan mengusulkan penurunan bunga pinjaman di lembaga itu.

Presiden juga berpesan agar para nelayan cermat dalam menggunakan uang pinjaman agar lebih produktif.

Kepada Sugiman, anggota bakul ikan dari Indramayu, yang meminjam sebesar Rp40 juta dari LKM, Presiden mengingatkan agar pinjaman tersebut digunakan sepenuhnya untuk usaha.

"Kalau mau pinjam tanya bunganya. Gunakan seluruhnya untuk modal kerja, modal usaha. Jangan dibelikan yang lain. Jangan sampai 20 juta buat beli motor," ujar Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga sempat berbincang dengan nelayan, salah satunya adalah Carikam.

Carikam adalah seorang nelayan budi daya udang vaname. Ia meminjam Rp50 juta dan ketika panen setelah 3 bulan, keuntungan yang didapat sebesar Rp50 juta.

"Tapi kalau itu waktu harga bagus. Kalau sekarang harga turun, keuntungannya Rp25 juta," ucap Carikam.

Ia meminta kepada Presiden untuk menaikkan harga udang vaname.

"Ya permintaan saya kepada pemerintah khususnya untuk meningkatkan ini Pak, harga (udang vaname)," ujarnya.

Presiden menanggapi aspirasi Carikam dengan menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa mengintervensi urusan harga.

"Ya urusan harga itu `enggak` mungkin pemerintah intervensi, harga itu ditentukan oleh pasar. Kalau produksinya banyak, permintaan berkurang, ya, pasti harganya turun, otomatis," katanya.

Oleh karena itu, Presiden pun menyarankan agar nelayan bisa memperhitungkan kapan harga naik atau turun, sehingga bisa menentukan juga kapan mulai menanam udang.

"Tapi kalau bisa kayak (udang) vaname ini yang banyak `kan untuk ekspor juga, ya, tolong dilihat kapan kita memulai menanam udang itu dan kapan panen. Dihitung betul sehingga harga itu betul-betul kita tahu kapan harga pas naik kapan pas harga turun," tuturnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini yaitu Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Di Karangsong, Indramayu, merupakan pertama kalinya penyaluran dana BLU LPMUKP melalui LKM, yakni Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Jasa Hasil Windu dan Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra.

Plafon yang disetujui masing-masing adalah Rp2 miliar untuk 100 orang pembudi daya dalam Pokdakan Jasa Hasil Windu dan Rp8 miliar untuk 323 nelayan yang tergabung dalam KPL Mina Sumitra.

Skema permohonan pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir ini sangat terjangkau bagi pelaku usaha, terutama untuk skala yang belum terjangkau Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pewartu: Joko Susilo

Editor: Kunto Wibisono